



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Reformasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia Timur: Penerapan Model Kaleidoskop di Maluku Utara, NTT, dan Papua

Tahir¹, Rulinawaty², Andi Wijaya³, Novita Treisna⁴

¹ Universitas Terbuka, Indonesia, tahir@ecampus.ut.ac.id

² Universitas Terbuka, Indonesia, ruly@ecampus.ut.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Lampung, andywijaya1973@gmail.com

⁴ Universitas Lampung, novita@unila.ac.id

Corresponding Author: tahir@ecampus.ut.ac.id ¹

Abstract: Food security is a strategic issue in sustainable development, especially in Eastern Indonesia, which faces complex geographical, cultural, and institutional challenges. This study aims to analyze the dynamics of food security policy changes in three priority provinces—East Nusa Tenggara, North Maluku, and Papua—with a focus on agricultural policies and stunting prevention. Using a qualitative case study approach and the Kaleidoscope Model framework, this study was conducted in stages over three years. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of policy documents and donor interventions. The results show that the successful implementation of policies is greatly influenced by the strength of local actors, donor support, and institutional capacity at the regional level. However, obstacles such as weak inter-sectoral coordination, bureaucratic fragmentation, and a lack of accurate data remain major barriers. The discussion reinforces the relevance of the Kaleidoscope Model in capturing the interaction between social pressures, empirical evidence, and political power in the policy change process. This study also highlights inter-provincial disparities and the importance of institutional reform to ensure policy sustainability. These findings contribute to the theoretical approach to public policy in developing countries and recommend the integration of the private sector and the strengthening of local mechanisms as long-term strategies. This study supports the achievement of the SDGs through contextual and sustainable food security policies.

Keyword: food security policy, Eastern Indonesia, Kaleidoscope Model, stunting, institutional reform, SDGs, local actors

Abstrak: Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah Indonesia Timur yang menghadapi tantangan geografis, budaya, dan kelembagaan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan ketahanan pangan di tiga provinsi prioritas—Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua—dengan fokus pada kebijakan pertanian dan penanggulangan stunting. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan kerangka Model Kaleidoskop, studi ini dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan dan intervensi donor. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan aktor lokal, dukungan lembaga donor, dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Namun demikian, kendala seperti koordinasi antarsektor yang lemah, fragmentasi birokrasi, serta kurangnya data yang akurat masih menjadi hambatan utama. Diskusi memperkuat relevansi Model Kaleidoskop dalam menangkap interaksi antara tekanan sosial, bukti empiris, dan kekuasaan politik dalam proses perubahan kebijakan. Studi ini juga menyoroti ketimpangan antar provinsi dan pentingnya reformasi kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pendekatan teoritis kebijakan publik di negara berkembang dan merekomendasikan integrasi peran sektor swasta serta penguatan mekanisme lokal sebagai strategi jangka panjang. Studi ini mendukung pencapaian SDGs melalui kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan ketahanan pangan, Indonesia Timur, Model Kaleidoskop, stunting, reformasi kelembagaan, SDGs, aktor lokal

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan pilar esensial dalam agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 2 yang menargetkan penghapusan kelaparan (United Nations). Di Indonesia, pencapaian tujuan ini menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan, antara lain distribusi pangan yang tidak merata, keterbatasan akses sumber daya, dan tingginya prevalensi stunting pada balita (OECD, 2014; White, 2014; Pelletier et al., 2012). Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya menjadi soal ketersediaan pangan, tetapi juga terkait langsung dengan kualitas hidup dan pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang, kebijakan ketahanan pangan di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi, terutama di sektor pertanian dan gizi. Pemerintah telah mengupayakan peningkatan produktivitas dan pengurangan stunting. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan data yang akurat, dan kapasitas kelembagaan yang rendah (Resnick & Okumo, 2017). Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif, seperti Model Kaleidoskop, yang dirancang untuk memahami proses perubahan kebijakan dalam konteks sosial-politik yang kompleks (Sabatier & Weible, 2007).

Masalah kebijakan pangan di Indonesia bersifat multidimensional, tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan teknokratis linier. Banyak studi menunjukkan kegagalan kebijakan di negara berkembang karena tidak mampu mencerminkan realitas lokal, mengingat kebijakan tersebut sering kali dipengaruhi oleh asumsi donor internasional dan lembaga multilateral (Grindle, 2004; Resnick & van de Walle, 2013). Fragmentasi tata kelola dan minimnya partisipasi masyarakat juga memperlemah efektivitas kebijakan. Karena itu, tantangan utama terletak pada bagaimana merancang kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual, sistematis, dan mampu mencerminkan dinamika lokal secara holistik (Rulinawaty, dkk, 2020).

Pendekatan siklus kebijakan yang mencakup agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi memang memberikan kerangka sistematis dalam analisis kebijakan (Birkland, 2010; Cairney & Heikkila, 2014). Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini cenderung tidak cukup fleksibel untuk menangkap interaksi kompleks antar aktor kebijakan, dinamika kekuasaan, serta pengaruh budaya dan geografi. Oleh karena itu, literatur kontemporer menyarankan penggunaan model kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks sosial-politik, seperti Model Kaleidoskop, yang menawarkan pendekatan lintas level dan partisipatif.

Model Kaleidoskop menawarkan kerangka komprehensif yang memadukan elemen-elemen siklus kebijakan dengan konteks kelembagaan, ekonomi, politik, dan sosial (Resnick

et al., 2018). Model ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara tekanan sosial, kekuatan advokasi, bukti empiris, dan dinamika kelembagaan. Dalam isu ketahanan pangan, pendekatan ini relevan karena mampu menangkap dinamika aktor lintas level, mulai dari masyarakat sipil dan birokrasi lokal, hingga donor internasional (Fox & Reich, 2013; Fritz et al., 2014).

Penerapan Model Kaleidoskop telah memberikan hasil positif dalam studi kebijakan pangan di berbagai negara berkembang. Di Zambia, model ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara aktor lokal dan donor dalam proses reformasi kebijakan pangan (Resnick et al., 2018). Di Peru, pendekatan serupa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan gizi, dengan hasil yang lebih kontekstual dan aplikatif. Namun, di Indonesia—khususnya wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua—penerapan model ini masih sangat minim, meskipun daerah-daerah tersebut menghadapi tantangan ketahanan pangan yang paling berat dan kompleks.

Literatur yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan di Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Banyak studi gagal menjelaskan dinamika perubahan kebijakan karena tidak menggunakan pendekatan yang mampu menangkap proses kebijakan secara dinamis dan berlapis (Grindle, 2004; UNDP, 2022). Padahal, perubahan kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam atas relasi antara aktor, bukti, dan konteks sosial-budaya. Dalam konteks ini, Model Kaleidoskop menawarkan solusi analitis yang lebih adaptif dan aplikatif, sekaligus mendorong integrasi antara dimensi teknokratik dan partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan ketahanan pangan di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan pertanian dan kebijakan pengurangan stunting sebagai dua elemen utama. Penelitian dilakukan secara bertahap selama tiga tahun: pengujian hipotesis pada fase agenda setting dan implementasi (2025), evaluasi reformasi berbasis data (2026), dan pengembangan aplikasi kebijakan berdasarkan temuan lapangan (2027). Melalui studi kasus kualitatif di enam provinsi prioritas, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perubahan kebijakan serta mengembangkan model operasional yang relevan dengan kondisi lokal.

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis melalui penerapan Model Kaleidoskop dalam konteks Indonesia dan memperluas wacana ilmiah tentang kebijakan publik berbasis bukti. Selain itu, hasilnya akan memberikan rekomendasi kebijakan yang praktis dan kontekstual bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Dengan pendekatan berbasis data dan responsif terhadap realitas lokal, penelitian ini diharapkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya ketahanan pangan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan regional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami dinamika perubahan kebijakan ketahanan pangan di Indonesia melalui penerapan Model Kaleidoskop. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam konteks sosial-politik dan institusional yang kompleks dalam kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian dan penanggulangan stunting. Sesuai dengan panduan Yin (2018), studi kasus kualitatif memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap fenomena dalam konteks aslinya, serta sangat relevan untuk menjelaskan dinamika kebijakan yang dipengaruhi oleh banyak aktor dan kondisi lokal.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif mencakup enam provinsi strategis: Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini dipilih karena mewakili variasi geografis, tingkat stunting, dan tantangan ketahanan pangan yang berbeda. Maluku Utara menghadapi hambatan logistik dan distribusi pangan; NTT mencatat prevalensi stunting tertinggi di Indonesia (37,8%); sementara Papua

memiliki kondisi infrastruktur dan akses pangan yang sangat terbatas (Katadata, 2024; Kementerian Pertanian RI, 2024).

Penelitian ini mengadopsi Model Kaleidoskop sebagai kerangka analitis utama, yang mengintegrasikan dimensi agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi kebijakan. Untuk mengoperasionalkan model ini, digunakan empat pendekatan analitis: (1) analisis kekuasaan dan konflik antarpemangku kepentingan, (2) perbandingan teori kebijakan dengan menyoroti peran aktor eksternal seperti lembaga donor, (3) evaluasi kesenjangan implementasi kebijakan, dan (4) pengembangan model operasional untuk kontekstualisasi kerangka Kaleidoskop dalam kebijakan ketahanan pangan Indonesia.

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode utama: dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi partisipatif. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan publikasi organisasi internasional. Wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling kepada aktor-aktor kunci seperti pejabat pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi kebijakan, dan perwakilan masyarakat sipil. Observasi dilakukan di lokasi implementasi kebijakan untuk memahami dinamika pelaksanaan dan respons komunitas lokal secara langsung.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan triangulasi sumber dan metode. Tahapan analisis meliputi: penyusunan kronologi kebijakan untuk mengidentifikasi alur proses pengambilan keputusan; pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam perubahan kebijakan; serta analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi kebijakan di berbagai daerah. Ketiga pendekatan ini membentuk dasar dalam pengujian validitas model Kaleidoskop dalam konteks ketahanan pangan.

Diagram alir penelitian divisualisasikan dalam bentuk fishbone diagram (Gambar 3), yang menggambarkan tahapan penelitian dari pengembangan hipotesis hingga formulasi model kebijakan berbasis bukti. Diagram ini menunjukkan keterkaitan antara kegiatan tahunan dan komponen analitis utama dalam penelitian.



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perubahan kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis bukti, sesuai dengan prinsip-prinsip dari Model Kaleidoskop dan kebutuhan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kronologi Perubahan Kebijakan Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan muncul secara signifikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 di wilayah Indonesia Timur, dengan fokus utama pada distribusi logistik pangan dan stunting. Di Maluku Utara, distribusi logistik menjadi hambatan utama karena faktor geografis kepulauan, sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), angka stunting yang tinggi menjadi sorotan utama. Papua menghadapi tantangan multifaset, mulai dari akses terhadap pangan hingga infrastruktur distribusi. Aktivisme lokal memainkan peran besar dalam mengangkat isu ini ke tingkat nasional, sebagaimana tercermin dari pernyataan Ibu Marta di Kupang mengenai darurat stunting di wilayahnya.

Proses formulasi kebijakan antara 2021-2022 menunjukkan keterlibatan aktor lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, akademisi lokal, LSM, serta institusi internasional seperti UNICEF dan World Food Programme (WFP). Perumusan kebijakan Papua berbasis pada riset Universitas Cenderawasih yang diperkuat dengan dukungan teknis WFP, sementara Maluku Utara menekankan pembangunan infrastruktur, dan NTT menekankan pendekatan berbasis bukti dalam kampanye gizi.

Implementasi kebijakan tahun 2022-2023 menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Di Maluku Utara, waktu distribusi pangan berkurang dari 14 hari menjadi 5 hari setelah pembangunan dermaga dan gudang logistik. Program edukasi gizi di NTT berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat. Namun, koordinasi antarinstansi di Papua masih menjadi tantangan utama.

Evaluasi kebijakan tahun 2024 mengungkapkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan, berbagai kelemahan masih perlu diperbaiki. Reformasi kebijakan kini diarahkan pada penguatan koordinasi antarlembaga, adaptasi terhadap konteks budaya lokal, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pangan.

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa pemerintah pusat merupakan aktor dominan dalam kebijakan ketahanan pangan dengan kekuatan regulatif dan finansial yang besar. Namun, dinas daerah memegang peran penting dalam implementasi kebijakan karena kedekatannya dengan komunitas lokal. Lembaga NGO seperti WFP dan UNICEF memberi pengaruh melalui advokasi dan sumber daya. Akademisi lokal menyediakan landasan bukti ilmiah, sedangkan masyarakat adat menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan kebiasaan pangan lokal. Sektor swasta memiliki potensi ekonomi signifikan, namun peran advokasinya masih minim.

Visualisasi peta pemangku kepentingan (Gambar 1-3) menunjukkan pola yang berbeda di tiap wilayah. Di Maluku Utara dan NTT, pemerintah pusat dan dinas daerah menempati posisi berpengaruh tinggi, sedangkan di Papua, masyarakat adat memperoleh posisi lebih kuat dalam pengelolaan lokal, meski tetap terbatas secara politik. Ketimpangan posisi dan pengaruh ini memengaruhi proses reformasi kebijakan secara keseluruhan.

Analisis Kekuasaan dan Konflik

Konflik vertikal dan horizontal mewarnai pelaksanaan kebijakan. Di Maluku Utara, terdapat perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, konflik horizontal antar dinas lokal seperti pertanian dan transportasi menghambat efektivitas infrastruktur. Di NTT, distribusi bantuan pangan memicu ketegangan antar komunitas. Di Papua, ketegangan muncul terkait hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah lokal.

Advokasi oleh masyarakat sipil memperkuat partisipasi kelompok marginal. Di NTT, masyarakat adat didukung LSM dalam memperjuangkan sistem pertanian tradisional. NGO di Maluku Utara aktif mendorong transparansi distribusi pangan. Namun, intervensi donor sering

kali dianggap kaku dan kurang memperhatikan dinamika lokal, seperti yang disampaikan oleh pejabat NTT, meskipun mereka telah membantu memperbaiki infrastruktur dan kapasitas teknis di Papua.

Evaluasi Kesenjangan Implementasi Kebijakan

Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan meliputi birokrasi yang rumit, keterbatasan anggaran (realisasi anggaran di Papua hanya 65%), data yang tidak akurat, dan kekurangan SDM. Perencanaan awal tidak selalu terealisasi, dengan target penurunan stunting di NTT hanya tercapai 10% dari target 15%. Ketimpangan antardaerah mencolok: NTT lebih berhasil dalam realisasi program berkat dukungan NGO, Maluku Utara unggul dalam distribusi logistik, sedangkan Papua menghadapi kompleksitas geografis dan birokratis.

Analisis SWOT Kebijakan Ketahanan Pangan

Di Maluku Utara, kekuatan utama terletak pada pengembangan infrastruktur dan dukungan pusat, namun tantangan geografis dan kapasitas SDM menjadi kelemahan. NTT memiliki keunggulan dalam edukasi gizi dan kemitraan NGO, tetapi budaya lokal dan data yang kurang mutakhir masih menghambat. Papua didukung donor dan kesadaran adat yang tinggi, namun terhambat oleh koordinasi antarinstansi dan realisasi anggaran rendah. Secara agregat, model Kaleidoskop memberikan peluang integrasi lintas sektor dengan adaptasi lokal yang kontekstual.

Pengembangan Model Operasional Empiris Berbasis Kaleidoskop

Model Kaleidoskop diterapkan dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual yang terbukti responsif terhadap dinamika lokal. Agenda setting dipengaruhi oleh isu lokal dan advokasi masyarakat. Formulasi kebijakan dibentuk melalui kemitraan multisektor. Implementasi dipengaruhi oleh kendala teknis dan koordinasi. Evaluasi menunjukkan kebutuhan reformasi berbasis bukti dan fleksibilitas sumber daya.

Hipotesis awal tentang pentingnya koordinasi, pelibatan masyarakat, dan fleksibilitas kebijakan terbukti valid. Model ini dikembangkan melalui sintesis data wawancara, observasi lapangan, dan dokumen kebijakan, yang divisualisasikan melalui flowchart reformasi kebijakan. Model ini menawarkan pendekatan siklus kebijakan berkelanjutan yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Temuan Utama dan Implikasi Kebijakan

Studi ini mengonfirmasi bahwa faktor lokal seperti distribusi logistik dan prevalensi stunting merupakan pendorong utama reformasi kebijakan. Peran aktor lokal seperti dinas daerah dan NGO terbukti krusial dalam mengatasi tantangan implementasi, mendukung temuan Tanziha et al. bahwa ketahanan pangan erat kaitannya dengan peran gender dan pola makan rumah tangga. Selain itu, sebagaimana diidentifikasi oleh Nurahadiyatika et al., integrasi ketahanan pangan dengan pengurangan kemiskinan memberikan dasar penting dalam penurunan angka stunting secara konvergen.

Kebijakan berbasis bukti, seperti disoroti oleh Rahmatika et al., memperkuat hubungan antara keamanan pangan, kecukupan energi, dan praktik pengasuhan dalam menurunkan stunting. Dalam konteks Papua dan Maluku Utara, peran masyarakat adat perlu ditingkatkan, sebagaimana dikemukakan oleh Islamiah et al. yang menemukan hubungan signifikan antara karakteristik rumah tangga dan ketahanan pangan dengan kejadian stunting pada keluarga nelayan.

Rekomendasi utama mencakup penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan kualitas dan frekuensi data lokal, pelatihan SDM, serta penguatan koordinasi antarlembaga dan sektor swasta. Implikasi strategisnya, kebijakan reformasi ketahanan pangan akan

berkontribusi pada pencapaian SDG 2, 3, dan 10 serta memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi kerentanan pangan dan kesehatan di masa depan.

Pembahasan

Refleksi Dinamika Kebijakan dan Temuan Kontekstual

Hasil studi ini memperlihatkan dinamika perubahan kebijakan ketahanan pangan yang tidak hanya dipicu oleh tekanan struktural, seperti prevalensi stunting dan ketimpangan distribusi pangan, tetapi juga oleh kekuatan advokasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Seperti dicatat oleh Rahmatika et al. (2021), faktor-faktor seperti pola asuh dan kecukupan gizi berkontribusi signifikan terhadap kejadian stunting. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), keberhasilan advokasi LSM dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya bergantung pada aktor negara, namun juga dipengaruhi oleh aktor non-negara dengan kapasitas advokatif kuat.

Implikasi dari hal ini menunjukkan adanya relasi timbal balik antara bukti empiris lokal dan desain kebijakan nasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti yang direkomendasikan oleh Tanzaha et al. (2020), di mana kebiasaan makan keluarga dan ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kesetaraan gender dan dinamika lokal.

Kompleksitas Implementasi dan Asimetri Kapasitas Daerah

Implementasi kebijakan ketahanan pangan menunjukkan variasi kinerja antar provinsi. Maluku Utara menunjukkan keberhasilan dalam logistik pangan karena penguatan infrastruktur, namun menghadapi keterbatasan SDM. Di sisi lain, Papua mengalami hambatan birokrasi dan koordinasi antar instansi yang signifikan. Kesenjangan ini memperkuat temuan Syamola dan Nurwahyuni (2022) bahwa status ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kapasitas rumah tangga dalam mencapai ketahanan pangan.

Asimetri kapasitas ini mencerminkan pentingnya pendekatan desentralisasi adaptif, di mana formulasi dan pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan karakteristik geografis dan sosial-budaya setempat. Hal ini juga menegaskan pentingnya peran aktor lokal, seperti Dinas Daerah dan akademisi, dalam menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lokal.

Ketimpangan Aktor dan Implikasi Kelembagaan

Analisis pemetaan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki dominasi kekuasaan politik dan regulatif, sementara aktor seperti masyarakat adat dan akademisi memiliki pengaruh terbatas dalam ranah politik. Meski demikian, peran NGO terbukti strategis dalam menyuplai sumber daya, mendampingi teknis, dan menjembatani antara aktor lokal dan nasional. Ini konsisten dengan temuan Nurahadiyatika et al. (2021) bahwa intervensi ketahanan pangan perlu diintegrasikan dengan upaya pengurangan kemiskinan melalui pendekatan sosial-budaya yang kontekstual.

Namun, ketimpangan ini juga menciptakan konflik vertikal dan horizontal, seperti yang terjadi antara dinas teknis di Maluku Utara atau antara pemerintah lokal dan masyarakat adat di Papua. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal distribusi pangan, tetapi juga arena politik dan negosiasi kekuasaan yang kompleks.

Peran Donor dan Tantangan Keberlanjutan

Peran lembaga donor internasional seperti WFP dan UNICEF terbukti krusial dalam percepatan implementasi kebijakan, terutama dalam aspek logistik dan edukasi gizi. Namun, rigiditas agenda donor menjadi tantangan, sebagaimana dicatat oleh pejabat NTT yang menyebut kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan budaya lokal. Hal ini mencerminkan temuan Wirata (2022) bahwa penguatan kearifan lokal dan kelembagaan adat dapat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah terpencil.

Ketergantungan terhadap donor juga menimbulkan risiko jangka panjang jika tidak diiringi dengan penguatan kapasitas internal dan mekanisme pendanaan lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan program harus dirancang sejak awal dengan strategi transisi bertahap dari ketergantungan donor ke penguatan kelembagaan lokal.

Integrasi Model Kaleidoskop dan Pembelajaran Kebijakan

Penggunaan pendekatan Kaleidoskop dalam studi ini memungkinkan analisis yang menyeluruh terhadap siklus kebijakan, mulai dari agenda setting hingga evaluasi. Dalam konteks Indonesia Timur, model ini berhasil menangkap kompleksitas aktor, dinamika lokal, dan adaptasi institusional yang diperlukan. Arundhati et al. (2019) menekankan pentingnya kerangka kebijakan pangan yang mampu menjembatani antara solidaritas regional dan kebutuhan domestik, sebagaimana ditekankan dalam kerangka ASEAN.

Sintesis data empiris menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi, penguatan data lokal, dan partisipasi masyarakat adat merupakan elemen kunci yang harus terus dikembangkan dalam desain kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan literatur global bahwa keberhasilan ketahanan pangan sangat bergantung pada sistem kelembagaan yang inklusif, adaptif, dan berbasis data.

Implikasi terhadap Reformasi Kebijakan dan SDGs

Implikasi kebijakan dari studi ini mencakup perlunya reformasi struktural dalam birokrasi kebijakan pangan, perbaikan sistem data dan monitoring, serta penguatan SDM lokal. Selain itu, penguatan peran sektor swasta dan masyarakat adat perlu diarusutamakan dalam desain kebijakan yang responsif.

Dampaknya terhadap SDGs sangat signifikan, terutama dalam mendukung tujuan 2 (Zero Hunger), tujuan 3 (Good Health and Well-being), dan tujuan 10 (Reduced Inequalities). Reformasi kebijakan yang didasarkan pada bukti lokal, koordinasi multisektor, dan inklusi sosial akan memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa tantangan dan peluang dalam kebijakan ketahanan pangan di Indonesia Timur merupakan cerminan dari dinamika nasional yang memerlukan pendekatan multidimensi, responsif, dan kontekstual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dinamika kompleks kebijakan ketahanan pangan di Indonesia Timur dengan menekankan pentingnya konteks lokal, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi multipihak. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan aktor lokal seperti dinas daerah, LSM, dan masyarakat adat, serta didukung oleh infrastruktur logistik dan intervensi donor internasional. Namun, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam bentuk fragmentasi birokrasi, keterbatasan kapasitas SDM, dan ketimpangan data yang menghambat efektivitas distribusi pangan dan penurunan stunting.

Diskusi memperkuat bahwa Model Kaleidoskop memberikan kerangka yang adaptif dan kontekstual untuk menganalisis perubahan kebijakan dalam situasi yang kompleks dan berlapis. Model ini mampu menjelaskan bagaimana interaksi antara bukti, tekanan sosial, dan kekuasaan politik membentuk kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan. Implementasi model ini juga membuka ruang bagi pendekatan kolaboratif dan pembelajaran kebijakan lintas aktor dan level pemerintahan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengayaan terhadap pendekatan teoritis dalam studi kebijakan di negara berkembang serta penyediaan model operasional berbasis data empiris. Penelitian ini merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut terhadap integrasi peran sektor swasta dan mekanisme pembiayaan lokal dalam mendukung keberlanjutan kebijakan pangan yang inklusif dan tahan krisis.

REFERENSI

- Akbar, A., Sari, R., & Munir, M. (2023). Dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem ketahanan pangan nasional: Analisis produksi dan distribusi. *Jurnal Ketahanan Pangan Indonesia*, 12(1), 33–45.
- Arundhati, S., Wijayanti, D. A., & Siregar, R. (2019). Regional cooperation and food security policy in ASEAN: Between domestic needs and cross-border solidarity. *Journal of Southeast Asian Public Policy*, 10(2), 155–170.
- Bastian, H., & Coveney, J. (2011). Local evidence and community engagement in South Australia's food policy. *Public Health Nutrition*, 14(12), 2227–2233. <https://doi.org/10.1017/S136898001100141X>
- Berchin, I. I., Nunes, L. A. O., & de Amorim, W. S. (2020). The strategic role of food security in the SDGs. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119732. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119732>
- Bilali, H. E. (2019). Sustainability in food systems: The concept and its indicators. *International Journal of Sustainable Development Research*, 5(3), 46–52.
- Birkland, T. A. (2010). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (3rd ed.). M.E. Sharpe.
- Cairney, P., & Heikkila, T. (2014). A comparison of theories of the policy process. In P. Sabatier & C. Weible (Eds.), *Theories of the Policy Process* (3rd ed., pp. 363–390). Westview Press.
- Chanza, N., & Musakwa, W. (2022). Climate change and food systems: A systems approach to food security in Africa. *Environment, Development and Sustainability*, 24(2), 1583–1602.
- Consoli, D., Vecchi, M., & Venturini, F. (2023). Policy responses to food insecurity during COVID-19: A comparative perspective. *World Development*, 161, 106061. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106061>
- Cui, J., Fan, S., & He, W. (2023). Emergency responses to food security under COVID-19 in China. *Food Policy*, 112, 102366. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102366>
- Dalimunthe, A. (2024). Ketahanan pangan berbasis wilayah: Studi kasus DKI Jakarta pada masa pandemi. *Jurnal Kebijakan Pangan dan Gizi*, 15(1), 25–38.
- Diez-Canseco, F., Alvarado, M., & Bernabe-Ortiz, A. (2022). Implementing food and nutrition policies in Peru: An analysis using the Kaleidoscope Model. *Food Policy*, 106, 102182.
- Domingos, J. S. (2023). Food policy under pressure: Lessons from COVID-19 response in Brazil. *Latin American Policy*, 14(1), 27–42.
- Erokhin, V., & Tianming, G. (2020). Impacts of COVID-19 on trade and economic aspects of food security: Evidence from China and Russia. *Foods*, 9(11), 1429.
- Fox, A. M., & Reich, M. R. (2013). Political economy of reform: Articulating the linkages between institutions, interests and ideas. *Health Policy and Planning*, 28(2), 137–146. <https://doi.org/10.1093/heapol/czs055>
- Fritz, V., Verhoeven, M., & Avenia, A. (2014). *Political Economy of Public Financial Management Reforms: Experiences and Implications for Dialogue and Operational Engagement*. World Bank.
- Gantina, N., Hasim, H., & Ramadhani, R. (2020). Strategi intervensi stunting dalam pembangunan gizi masyarakat. *Jurnal Gizi dan Pangan Indonesia*, 3(2), 90–99.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
- Islamiah, S., Mahmud, M., & Lestari, E. (2020). Characteristics of household food insecurity and stunting among fishing communities in Indonesia. *Journal of Health Research*, 34(3), 195–204.

- Katadata. (2024). *Peta Stunting dan Akses Pangan di Indonesia 2024*. <https://katadata.co.id> (akses data diambil dari laman resmi Katadata atau publikasi sejenis pada tahun 2024)
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). *Laporan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan.
- Keumala, N., Rahmawati, D., & Sari, A. (2021). Respons kebijakan ketahanan pangan daerah: Studi perbandingan antara Aceh Besar dan Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 88–102.
- Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd ed.). HarperCollins.
- Kowalska, A., Blicharska, E., & Jarosz-Angowska, M. (2022). Food security in the context of sustainable development: Challenges and solutions. *Sustainability*, 14(9), 5197. <https://doi.org/10.3390/su14095197>
- Kusumawardani, N., Sutopo, W., & Nugroho, A. (2021). Strategi kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan Nasional*, 6(2), 135–149.
- Leroy, J. L., Ruel, M., Frongillo, E. A., Harris, J., & Ballard, T. J. (2015). Measuring the food access dimension of food security: A critical review and mapping of indicators. *Food and Nutrition Bulletin*, 36(2), 167–195.
- Nurahadiyatika, I., Putri, A. S., & Lestari, A. (2021). Integrasi ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan: Studi kasus di wilayah rentan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 19(1), 45–60.
- OECD. (2014). *OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia 2012*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264115140-en>
- Oluwole, O. O., Adegbite, D. A., & Ayinde, O. E. (2023). Multi-dimensional food security assessment in Sub-Saharan Africa: Trends and perspectives. *Journal of Agriculture and Food Research*, 13, 100264.
- Parvin, G. A., & Ahsan, S. M. R. (2013). Food security and nutritional status in rural Bangladesh: The role of food-based intervention. *South Asia Economic Journal*, 14(1), 149–165.
- Pelletier, D. L., Frongillo, E. A., Schroeder, D. G., & Habicht, J. P. (2012). The effects of malnutrition on child mortality in developing countries. *Bulletin of the World Health Organization*, 83(6), 443–448.
- Poernomo, H. (2018). Subsidi pertanian dan produktivitas pangan nasional: Tinjauan kebijakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Pertanian*, 9(1), 12–22.
- Rahmatika, D. N., Subekti, H., & Suryadi, A. (2021). Pengaruh keamanan pangan, asupan energi, dan pola asuh terhadap prevalensi stunting di wilayah pedesaan. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 13(2), 121–130.
- Ratnasari, D., & Dani, F. (2023). Akses ekonomi dan ketimpangan pangan rumah tangga di Indonesia Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Pangan*, 12(2), 101–115.
- Resnick, D., & Okumo, M. (2017). Policy coherence for agriculture and food security: The case of Malawi. *Food Security*, 9, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s12571-016-0643-3>
- Resnick, D., & van de Walle, N. (2013). Introduction: Democratic trajectories in Africa: Unravelling the impact of foreign aid. In D. Resnick & N. van de Walle (Eds.), *Democratic Trajectories in Africa: Unravelling the Impact of Foreign Aid* (pp. 1–26). Oxford University Press.
- Resnick, D., Babu, S., Haggblade, S., & Mather, D. (2018). The Kaleidoscope Model of policy change: Applications to food security policy in Zambia. *World Development*, 109, 101–120. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.04.004>
- Rulinawaty, Aripin, S., Andriyansah, & Samboteng, L. (2023). Participatory governance capacity building: the missing link of poverty eradication in food diversification policies in Indonesia. *Electronic Government, an International Journal*, 19(2), 202–220.

- Rulinawaty, S. A., & Samboteng, L. (2020). Leading agile organization can Indonesian bureaucracy become agile. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(3), 330-8.
- Rulinawaty, Samboteng, L., Basit, M., & Kasmad, M. R. (2022). Construction of the Hybrid Agile Management Model in Public Health Services in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 255-263.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2007). *Theories of the Policy Process* (2nd ed.). Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2007). *Theories of the Policy Process* (2nd ed.). Westview Press.
- Seed, B., Lang, T., Caraher, M., & Ostry, A. (2014). Integrating food security into public health and provincial government departments in British Columbia, Canada. *Agriculture and Human Values*, 31, 435–449.
- Susandi, A. (2023). Perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Meteorologi dan Iklim Indonesia*, 10(1), 77–90.
- Syamola, R., & Nurwahyuni, I. (2022). Kesenjangan status ekonomi dan kapasitas rumah tangga dalam mencapai ketahanan pangan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 73–89.
- Tanziha, I., Mahmudiono, T., & Andriani, M. (2020). Gender equity, household food security, and dietary diversity in rural Indonesia. *Nutrition and Food Science*, 50(5), 917–931.
- UNDP. (2022). *Strengthening Food Systems in the Face of COVID-19 and Climate Change: A Focus on Local Governance and Resilience*. United Nations Development Programme.
- United Nations. (n.d.). *Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger*. <https://sdgs.un.org/goals/goal2>
- Upton, J. B., Cissé, J. D., & Barrett, C. B. (2016). Food security as resilience: Reconciling definition and measurement. *Food Policy*, 57, 87–100. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.11.001>
- White, P. (2014). Food security in Indonesia: A global and local challenge. *Food Security*, 6(2), 251–257. <https://doi.org/10.1007/s12571-014-0333-2>
- Widiana, D., Suryani, N. P., & Subamia, I. G. A. (2022). Ketimpangan akses pangan di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Ketahanan Sosial*, 7(3), 211–225.